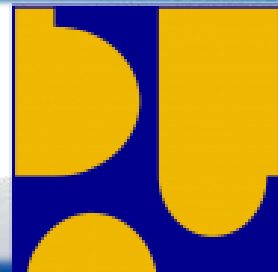


# REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Tahun Anggaran 2013–2018



PEMERINTAH KOTA BIMA  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
Jl. Gatot Subroto No.01 Telp. 0374 – 646441  
TAHUN 2017




## PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmad dan hidayahNya kita dapat menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2013 – 2018 hingga selesai. Reviu Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dengan tupoksinya maupun penyesuaian terhadap program/kegiatan untuk 2 tahun kedepan.

Sehubungan dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88), serta Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja OPD Kota Bima, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bima perlu menindaklanjuti dengan menyusun Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Harapan kami Reviu Renstra ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2018 dan tentunya saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan guna kelancaran dalam implementasinya.

Raba-Bima, Oktober 2017

 **Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang  
Kota Bima,** 



**MUHAMMAD AMIN S.Sos.**

Pembina Utama Muda (IV/a)

NIP. 19621231 198502 1 024



## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD .....	12
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD .....	12
2.2 Sumber Daya OPD .....	23
2.3 Kinerja Pelayanan OPD .....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD .....	31
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	35
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	37
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Terkait dan RPJMD Kota Bima .....	42
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis .....	61
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	65
4.1 Visi dan Misi SKPD .....	65
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	67
4.3 Strategi dan Kebijakan .....	71
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	74
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	86
BAB VII PENUTUP .....	81



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 2 (dua) tahun yaitu tahun 2017-2018. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dalam rangka memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bisa diprediksi pada tahun 2018 mencapai tahapan melalui sumber pembiayaan APBD. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk, wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga tahun 2018 mendatang.

Sebagai tindaklanjut pelaksanaan Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88), serta Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja OPD Kota Bima, terdapat perubahan terhadap nomenklatur nama OPD yang semula Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk susunan organisasinya, dengan demikian perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis.

Dengan perubahan peraturan perundang – undangan tersebut diatas dan perubahan nomenklatur kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berikut terdapat perubahan terhadap tugas pokok dan fungsinya.

Secara garis besar permasalahan pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi (1) belum terpenuhinya kebutuhan permukiman yang layak huni. Adapun permasalahan pokok air bersih meliputi belum terpenuhinya pelayanan air bersih, (2) belum memadainya pelayanan sanitasi

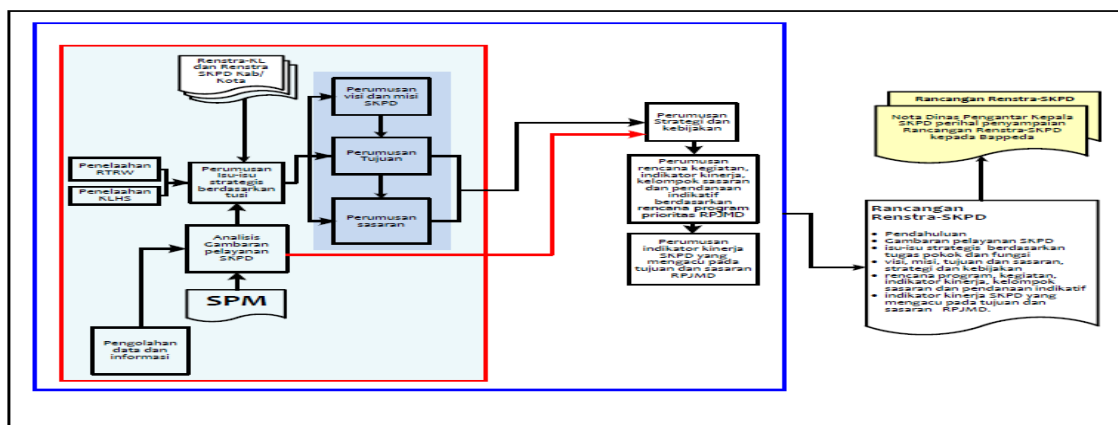




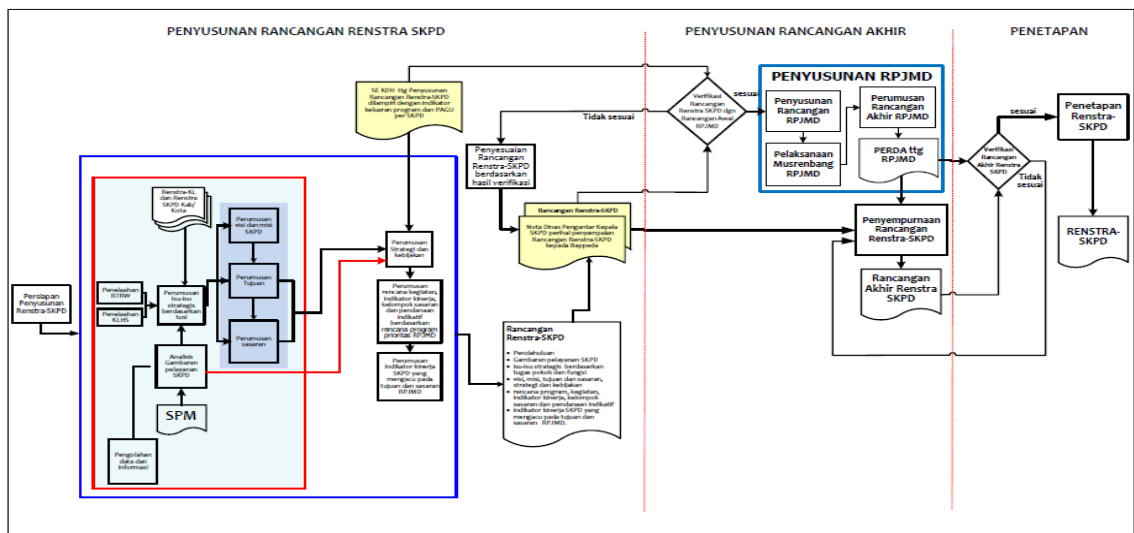
yang hal itu dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah, (3) masih adanya daerah genangan air di kawasan perdesaan dan perkotaan dan (4) diperlukan penataan bangunan guna penegakan aturan keselamatan bangunan, (5) Terdapat defisit imbalan air irigasi pada beberapa DI di musim kemarau serta bangunan irigasi yang sudah berumur, (6) Pembukaan jalan ekonomi dan atau jalan usaha tani dengan dukungan pemeliharaan jalan dan jembatan Kota Bima sangat dibutuhkan untuk memberikan akses kegiatan ekonomi masyarakat.

Mengingat permasalahan-permasalahan pokok dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman tersebut secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka penanganan bidang pekerjaan umum disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan pada pelaksanaan pembangunannya juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal. Dengan tersusunnya Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan perencanaan dan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran yang diinginkan dalam kurun waktu tahun 2017 - 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunannya melalui tahapan sebagaimana dituangkan pada Gambar 1.1. Tahapan penyusunan rancangan Renstra OPD sedangkan Gambar 1.2. Tahapan sampai dengan penetapan Renstra OPD.



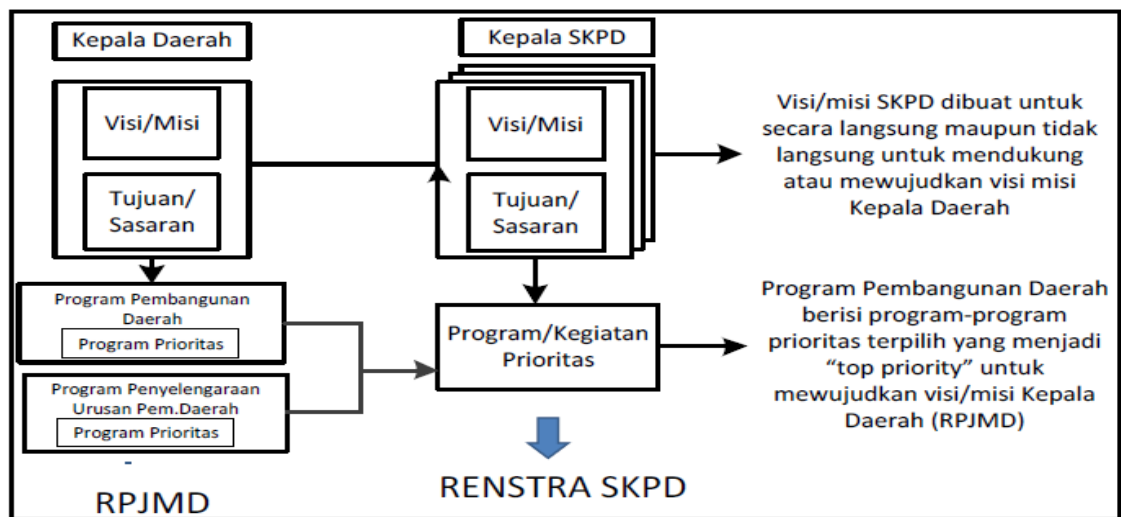
Gambar 1.1. : Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra OPD



Gambar 1.2. : Bagan Alir Tahapan Penetapan Renstra OPD

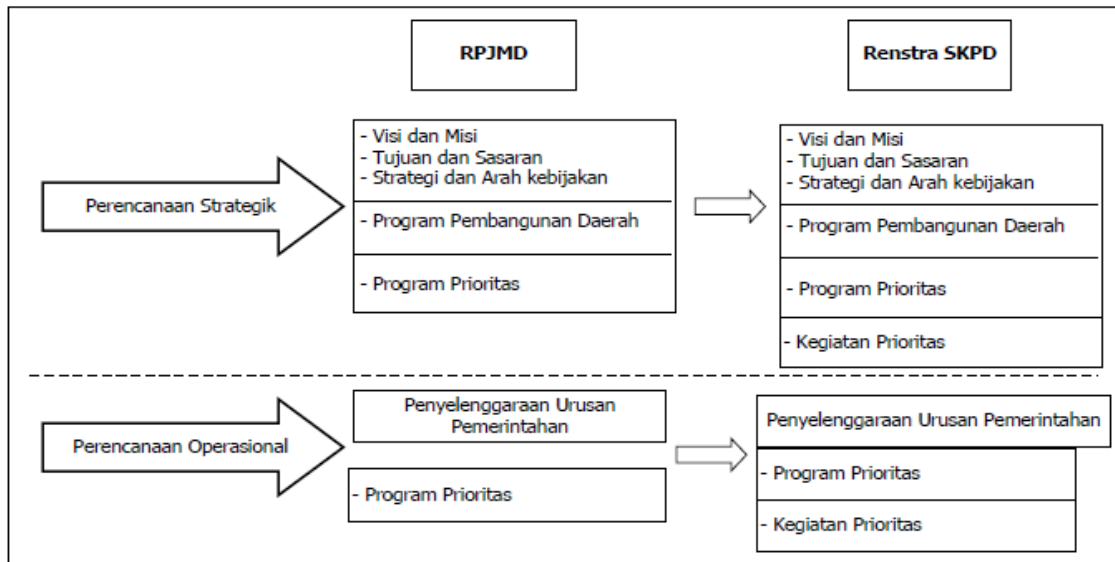
Penyusunan Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima 2017-2018 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi OPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima (RPJMD) 2013-2018, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait.

Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Walikota dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala OPD dijabarkan dalam Renstra OPD. Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing. Gambar 1.3. dan Gambar 1.4. menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra OPD.



Gambar 1.3. : Hubungan antara RPJMD dengan Renstra OPD





Gambar 1.4. : Hubungan Muatan RPJMD dan Renstra OPD

Dengan mengingat bahwa program pembangunan harus sinergis, dan terkoordinasi, RPJMD tidak bisa lepas dari RPJM Nasional. Keterkaitan antara RPJM Nasional, RPJMD dan Renstra Dinas bisa dilihat pada Gambar 1.5.



Gambar 1.5. : Hubungan antara RPJM Nasional, RPJMD dan Renja OPD

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD meliputi :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukam Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);





14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
17. Peraturan Walikota Bima Nomor : 2 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Bima Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima.
18. serta Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja OPD Kota Bima.

Sedangkan landasan hukum yang menjadi acuan teknis penyusunan Reviu Rensta Dinas adalah semua Undang-undang dan aturan turunannya terkait urusan pekerjaan umum, perumahan, dan penataan ruang. Undang-undang tersebut meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta aturan turunannya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta aturan turunannya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air beserta aturan turunannya;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta aturan turunannya;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan beserta aturan turunannya;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima tahun 2013 – 2018 adalah sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, dan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja OPD Kota Bima serta sebagai pedoman



dan arah bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya periode Tahun 2017 – 2018.

### 1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2013 – 2018 adalah :

1. Memberikan gambaran atas perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap tugas pokok dan fungsinya.
2. Memberikan gambaran informasi kondisi capaian pelayanan dan permasalahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Memberikan gambaran rencana strategis pembangunan jangka menengah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna mencapai target serta pelayanan sampai dengan tahun 2018.
4. Memberikan pedoman penyusunan program/kegiatan tahun 2017–2018.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang menjelaskan tentang tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD), Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. **PENDAHULUAN**, berisi tentang prinsip dasar penyusunan Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

1.1 **Latar Belakang**, Mengemukakan secara ringkas pengertian Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, fungsi Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, keterkaitan Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dengan RPJMD, Renstra Direktorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, dan dengan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

1.2 **Landasan Hukum**, Memuat penjelasan tentang undang-

undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

- 1.3 **Maksud dan Tujuan**, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.
- 1.4 **Sistematika Penulisan**, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**KOTA BIMA**, Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima ini.

- 2.1 **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima**, Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima (proses, prosedur, mekanisme)
- 2.2 **Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima**, Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya

yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

- 2.3 **Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima**, Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima berdasarkan sasaran/target Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dan atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima**, Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas PUPR Provinsi NTB dan hasil telaahan terhadap RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima pada lima tahun mendatang.

### BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima**, Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**, Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- 3.3 **Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas PUPR Provinsi NTB**, berisi Reviu Renstra Direktorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.





- 3.4 **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**, mencakup tujuan dan sasaran RTRW, struktur dan pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
- 3.5 **Penentuan Isu-isu Strategis**, Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

#### BAB IV. **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. **Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima**, Perumusan visi dan misi jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima sebagai hasil dari analisis sebelumnya.
- 4.2. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima**, adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima selama lima tahun.
- 4.3. **Strategi dan Kebijakan**, adalah strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

#### BAB V **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**, Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang Kota Bima.

**BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BIMA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

### **KOTA BIMA**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima**

##### **2.1.1. Dasar Hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dasar pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188), Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, serta Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja OPD Kota Bima.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh satu orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang, yaitu :

- a. Bidang Bina Marga.
- b. Bidang Cipta Karya.
- c. Bidang Sumber Daya Air
- d. Bidang Penataan Ruang

##### **2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
  - a. Bidang Bina Marga, terdiri dari:

- (i) Sub Bidang Perencanaan Teknis dan Legger Jalan;
  - (ii) Sub Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - (iii) Sub Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- b. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
- (i) Sub Bidang Tata Bangunan;
  - (ii) Sub Bidang Air Minum;
  - (iii) Sub Bidang Kesehatan Lingkungan.
- c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
- (i) Sub Bidang Perencanaan Prasarana Sumber Daya Air;
  - (ii) Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Air;
  - (iii) Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
- d. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:
- (i) Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang;
  - (ii) Sub Bidang Pemanfaatan Tata Ruang;
  - (iii) Sub Bidang Pengendalian Tata Ruang.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Work Shop.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Perangkat Daerah Kota Bima dan Peraturan Walikota Bima nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja OPD Kota Bima. Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima mengemban **Tugas Pokok** yaitu : **"Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota yang mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, penyusunan perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan"**.

Adapun Fungsi Dinas Pekerjaan Umum :

- Perumusan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas sesuai dengan Visi dan Misi Daerah.
- Penetapan Rencana Strategis Dinas untuk mendukung Visi dan Misi Daerah serta kebijakan Walikota.



- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana Perangkat Daerah.
- Pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima memiliki bagian-bagian yang terdiri dari: 1). Bagian Sekretariat, 2). Bidang Bina Marga, 3). Bidang Cipta Karya, 4). Bidang Sumber Daya Air, 5). Bidang Penataan Ruang, 6) UPTD " Workshop Alat Berat dan Laboraturium".

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut.

#### A. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan program kerja Dinas;
  - b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkup dinas;
  - c. Penyiapan bahan, pedoman/petunjuk tata laksana administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
  - d. Penyiapan dan Koordinasi rencana anggaran dan belanja dinas;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
  - f. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada Sekretariat terdapat 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dalam pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan dan melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dan

penataan organisasi dinas serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitas teknis dan laporan yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengendalian dalam program, penyusunan laporan, melakukan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

#### B. Bidang Bina Marga

1. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan;
2. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kerja dinas dan program pembangunan di bidang ke-bina margaan;
  - b. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan pengendalian dan pembinaan dalam bidang bina marga;
  - c. Pelaksanaan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan Jalan/Jembatan dan bangunan pelengkap;
  - d. Pengawasan dan pengendalian dalam rangka memberikan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pekerjaan kebinamargaan;
  - e. Fasilitasi kerja sama dalam pengembangan prasarana/sarana jalan dan jembatan;
  - f. Penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
  - g. Pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada Bidang Bina Marga terdapat 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Perencanaan Teknis dan Legger Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan jalan dan jembatan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b. Sub Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan jalan dan jembatan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c. Sub Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program pemeliharaan jalan dan jembatan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### C. Bidang Cipta Karya

1. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan wilayah, pembangunan prasarana pemukiman, pembinaan penataan bangunan dan pengembangan perumahan, perkotaan;
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana teknis dan program pembangunan di bidang cipta karya;
  - b. Pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang perumahan dan pemukiman;
  - c. Pengawasan, pengendalian serta penyiapan pedoman dan petunjuk teknis dan pelaksanaan penimbangan prasarana perumahan dan pemukiman;
  - d. Pengelolaan gedung pemerintah dan rumah dinas;
  - e. Pengumpulan, pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Pada Bidang Cipta Karya terdapat 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
  - a. Sub Bidang Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan dalam bidang perumahan dan pemukimanserta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - b. Sub Bidang Air Minum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan pelaksanaan pembangunan dalam Pengelolaan Air Minum serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - c. Sub Bidang Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan pelaksanaan pembangunan dalam Penyehatan Lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

*D. Bidang Sumber Daya Air*

1. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, bimbingan, Pengelolaan dan pengembangan konservasi sumber daya air dan jaringan irigasi serta penyiapan data ketersediaan dan pemanfaatan air;
2. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana pengembangan konservasi sumber daya air dan jaringan irigasi;
  - b. Pengawasan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemanfaatan atas sumber daya air dan jaringan irigasi pertanian, industri, air bersih dan keperluan lainnya;
  - c. Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya yang terkait dengan pengairan;
  - d. Pemantauan pada daerah pengaliran sungai (DPS) dan pantai serta pengamanannya;
  - e. Penyiapan rekomendasi perijinan pengembangan sumber daya air serta pemanfaatan sumber daya alam diwilayah sumber daya air dan jaringan irigasi;



- f. Pelaksanaan pemberian bimbingan penerapan teknologi pengairan;
  - g. Pengumpulan dan pengolahan data, monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya air serta pelaporan;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada Bidang Sumber Daya Air terdapat 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
- a. Sub Bidang Perencanaan Prasarana Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - b. Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - c. Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

*E. Bidang Penataan Ruang*

- 1. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensosialisasikan, menertibkan pemanfaatan;
- 2. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja kegiatan bidang;
  - b. Merumuskan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
  - c. Melaksanakan kegiatan anggaran bidang;
  - d. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi terkait;

- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pertambangan dan energi;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada Bidang Penataan Ruang terdapat 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
- a. Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemanfaatan ruang serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - b. Sub Bidang Pemanfaatan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemanfaatan tata ruang serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - c. Sub Bidang Pengendalian Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian tata ruang serta tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

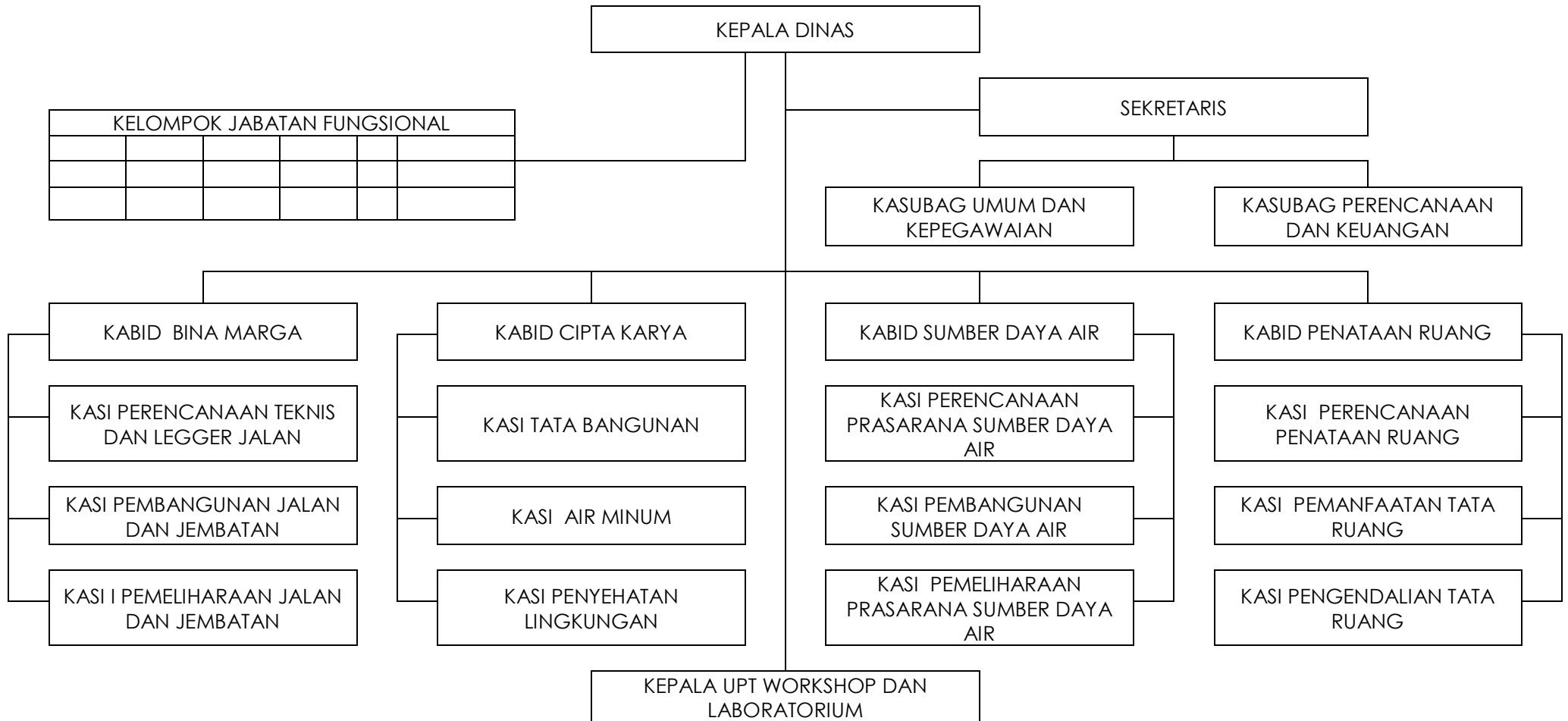
*F. UPTD Work Shop*

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor: 12 Tahun 2009, Tentang unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Bima ditetapkan "Workshop Alat Berat dan Laboratorium" sebagai UPTD dibawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima;
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, UPT Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan pengelolaan alat berat dan fasilitas laboratorium pengujian material;
  - b. Merencanakan dan mengorganisasikan pemeliharaan alat berat secara teratur dan konsisten untuk memenuhi kesiapan dan pendayagunaan alat berat dan laboratorium sesuai dengan target yang telah ditentukan;
  - c. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dan penyewaan alat berat dan laboratorium;
  - d. Menganalisa kerusakan yang terjadi pada alat berat dan laboratorium;
  - e. Menganalisa dan merekomendasikan biaya perbaikan terhadap kerusakan alat berat dan laboratorium;

- f. Menyediakan laporan pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan dan penyewaan alat berat dan laboratorium.



Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima



Adapun Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :

- a. Bidang sumber daya air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan Kota Bima, dengan tiga pilar pengelolaan sumberdaya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
- b. Bidang kebinamargaan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan jalan dan jembatan yang berstatus Jalan dan Jembatan Kabupaten/Kota , baik yang terkait pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan dari jaringan jalan yang ada di wilayah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Bidang keciptakarya melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (basic infrastructure) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan ini meliputi: (1) Permukiman, (2) Air Minum, (3) Air Limbah, (4) Drainase, dan (5) Penataan Bangunan dan Lingkungan. Khusus bidang Cipta Karya, pada prinsipnya hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan pada bidang ini merupakan tanggung-jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Bima melaksanakan tugas-tugas TURBINWAS dan yang bersifat concurrent atas permintaan daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah serta Standar Pelayanan Minimum (SPM).
- d. Bidang Penataan Ruang, berperan dalam perencanaan dan penataan ruang, pemanfaatan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan tata ruang Kota Bima. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang penataan Ruang menyelenggarakan fungsi perencanaan, panataan dan pengembangan kawasan sesuai dengan RTRW Kota Bima, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap RTRW.

## 2.2. Sumberdaya SKPD

### 2.2.1. Sumberdaya Manusia

Hingga Bulan Juli 2013, pegawai yang ada berjumlah 51 orang, dengan rincian sebagai berikut.

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	SLTP	1	1,96%
2.	SLTA	12	23,53%
3.	D3	3	5,88%
4.	D4	-	-
5.	S1	30	58,82%
6.	S2	5	9,80%
<b>Total</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	2	3,92%
2.	Golongan III	36	70,59%
3.	Golongan II	12	23,53%
4.	Golongan I	1	1,96%
<b>Total</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>

c. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	-	-
2.	Eselon III	5	9,80%
3.	Eselon IV	10	19,61%
4.	Non-Eselonering	36	70,59%
<b>Total</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>





## 2.2.2. Sumberdaya Aset/Modal

Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 1 Juni 2013 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, kendaraan dinas, kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel 2.4. Sisanya adalah aset infrastruktur yang merupakan infrastruktur publik.

- a. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet, dan mesin faksimili;
- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis perencanaan, dilengkapi dengan ketersediaan printer;
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, GPS, mesin tik, dan LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemari es, *air conditioner* (AC), *dispenser*, kipas angin, dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

## 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

### 2.3.1. Geografi

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat *teknis*, oleh karena itu lembaga ini berperan penting dalam Pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing nasional. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi



yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, infrastruktur Pekerjaan Umum juga berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian, industri, kelautan dan perikanan. Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum karenanya berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, termasuk kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015.

Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman tersebut terlihat melalui: (i) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berperan untuk mendukung distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun pembentuk struktur ruang wilayah; (ii) Infrastruktur sumber daya air yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri, dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan, dan pelaksanaan konservasi sumber daya air, serta pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; dan (iii) Infrastruktur permukiman yang berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan dan revitalisasi kawasan serta pengembangan kawasan agropolitan. Seluruh penyediaan infrastruktur tersebut diselenggarakan berbasiskan penataan ruang.



Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima Tahun 2008-2012

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Tabel 2. Anggaran Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima Tahun 2008-2012

Uraian	Anggaran pada Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PENDAPATAN DAERAH	958.000.000			1.509.244.600	1.404.000.000
- Pendapatan Asli Daerah	958.000.000			1.509.244.600	1.404.000.000
- Hasil retribusi daerah	14.900.000			370.000.000	1.034.000.000
- Lain-lain PAD yang Sah	943.100.000			1.139.244.600	370.000.000
BELANJA DAERAH	38.884.975.187			61.365.511.588	32.636.040.832
- Belanja tidak langsung	1.660.395.187			2.333.701.588	2.165.905.832
- Belanja langsung	37.224.580.000			59.031.810.000	30.470.135.000



Uraian	Anggaran pada Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belanja pegawai	1.475.002.000			339.421.000	364.676.000
Belanja barang dan jasa	557.245.500			1.368.496.000	1.030.425.900
Belanja modal	35.192.332.500			57.323.893.000	29.075.033.100

Tabel 3. Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima Tahun 2008-2012

Uraian	Realisasi Anggaran pada Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PENDAPATAN DAERAH	464.124.690			270.080.707	202.292.600
- Pendapatan Asli Daerah	464.124.690			270.080.707	202.292.600
- Hasil retribusi daerah	6.950.000			10.200.000	201.792.600
- Lain-lain PAD yang Sah	457.174.690			259.880.707	500.000
BELANJA DAERAH	30.531.962.819			60.684.983.863	31.370.247.573
- Belanja tidak langsung	1.635.823.191			2.055.231.744	2.108.450.501
- Belanja langsung	24.546.139.628			58.629.752.119	29.261.797.072
Belanja pegawai	1.358.445.000			155.600.000	353.270.000
Belanja barang dan jasa	416.318.361			1.207.011.519	918.467.596
Belanja modal	22.771.376.267			57.267.140.600	27.990.059.476

Tabel 4. Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima Tahun 2008-2012

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2008	2009	2010	2011	2012	Anggaran	Realisasi
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	8,45%			17,90%	14,41%	110.248.920	52.366.418
- Pendapatan Asli Daerah	48,45%			17,90%	14,41%	154.849.784	37.459.920
- Hasil retribusi daerah	46,64%			2,76%	19,52%	56.756.000	8.757.704
- Lain-lain PAD yang Sah	48,48%			22,81%	0,14%	98.093.784	28.702.216
BELANJA DAERAH	78,52%			98,89%	96,12%	5.315.461.104	4.903.487.770
- Belanja tidak langsung	98,52%			88,07%	97,35%	246.400.104	231.980.217
- Belanja langsung	65,94%			99,32%	96,03%	5.069.061.000	4.497.507.553
Belanja pegawai	92,10%			45,84%	96,87%	87.163.960	74.692.600
Belanja barang dan jasa	74,71%			88,20%	89,13%	18.246.696	101.671.899
Belanja modal	64,71%			99,90%	96,27%	4.863.650.344	4.321.143.054

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum secara keseluruhan. Menurunnya fungsi jaringan irigasi disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau.

Pengelolaan irigasi juga melibatkan masyarakat melalui Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) ataupun Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan jaringan irigasi khususnya di jaringan tersier. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bima adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) DI.

Berkembangnya daerah permukiman telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air (seperti Dam, Embung/telaga, Bendungan). Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air baku untuk rumah tangga dan industri (termasuk perhotelan) yang masih rendah memicu eksplorasi air tanah yang cenderung meningkat yang kalau tidak dikendalikan bisa menyebabkan land subsidence.

Penambahan penyediaan air baku bagi masyarakat dilaksanakan melalui Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dalam rangka penyediaan air baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan, khususnya untuk irigasi dan air bersih. Sumber air diambil dari air tanah melalui pengeboran sumur dalam, atau melalui bangunan pengambilan yang dipasang di sungai dan kemudian dinaikkan ke atas dengan pompanisasi. Khusus untuk irigasi, lahan pertanian yang diairi selama ini merupakan sawah tadah hujan. Dengan tersedianya irigasi sistem pompa, petani telah dapat meningkatkan produksi di lahan pertaniannya.

Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan (seperti banjir diwilayah-wilayah permukiman tepi sungai). Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan pantai akibat abrasi yang mengancam keberadaan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya.



Penanganan banjir terhadap daerah potensi dilaksanakan melalui Program Pengendalian Banjir dalam rangka pemeliharaan sungai dan bantaran sungai. Setiap terjadi banjir, tebing sungai mengalami gerusan yang mengakibatkan longsor tebing sungai. Untuk penanganan hal tersebut diperlukan konstruksi penahan tebing yang aman dan ramah lingkungan berupa konstruksi bronjong.

Infrastruktur bidang Cipta Karya yang mencakup sub bidang air minum, sanitasi, drainase, pengembangan permukiman, dan penataan bangunan dan lingkungan menunjukkan pula kondisi yang beragam.

Untuk sub bidang air minum, dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannya telah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistem penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki rujukan strategis yang jelas.

Secara total target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007 sebanyak 11,34% rumah tangga masih membuang sampah ke kali/selokan yang menyebabkan mampatnya saluran drainase. Di sisi lain banyak dijumpai pula bahwa fungsi saluran drainase tidak tegas apakah untuk mengalirkan kelebihan air permukaan atau juga berfungsi sebagai saluran air limbah.

Adapun pada sisi manajemen, yang juga tidak kalah penting perannya dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, kondisi saat ini yang masih dirasakan adalah belum fokus dan berjalannya fungsi-fungsi manajerial secara optimal. Kondisi mencolok yang paling terasa adalah implementasi fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang/sub bidang yang menjadikewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang masih lemah termasuk dengan sektor pembangunan lainnya. Selain itu dimensi penyelenggaraan infrastruktur yang berkelanjutan termasuk aspek pemanfaatan teknologi dan aspek pengelolaan yang memperhitungkan risiko kegagalan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan prima bagi masyarakat juga belum cukup

mendapat perhatian. Kondisi manajerial tersebut diperlemah pula oleh sistem pengendalian internal dan belum sepenuhnya aparat pelaksana patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

Sedangkan untuk memwadahi kegiatan konservasi energi yang diamanatkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam regulasi-regulasi terkait konservasi energi, maka disusun program baru yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi. Program ini bertujuan untuk implementasi dan penerapan konservasi energi dengan arah kebijakan meningkatkan efisiensi penggunaan energi melalui konservasi energi pada sektor-sektor pengguna energi prioritas.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

### **2.4.1. Tantangan**

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tantangan pembangunan Bidang Sumber Daya Air (SDA).
  1. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan land subsidence dan intrusi air asin/laut.
  2. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target Millennium Development Goals (MDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.
  3. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim

hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.

4. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi
  5. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.
  6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.
- b. Tantangan pembangunan Bidang ke Bina Marga-an.
1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik daerah dan nasional.
  2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
  3. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
  4. Menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah terutama percepatan pembangunan kawasan terisolir.
  5. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet.
  6. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada wilayah Kota Bima.
  7. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.
- c. Tantangan pembangunan Bidang ke Cipta Karya-an.
1. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas.

2. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
  3. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
  4. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
  5. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
- d. Tantangan pembangunan Bidang Penataan Ruang.
1. Dalam prosesnya kerap meninggalkan dimensi kemanusiaan, karena lebih fokus pada konektivitas infrastruktur, dan sering disebut sebut sebagai dehumanisasi perencanaan, yang apabila dibiarkan akan menghasilkan ruang-ruang yang tidak layak huni karena menerobos daya dukung lingkungan (*carrying capacity*), delineasi ekoregion, dan optimasi ruang.
  2. Pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar terhambat karena konflik ruang. Proyek-proyek strategis bertabrakan dengan produk rencana di level nasional dan lokal
- e. Tantangan pembangunan Sekretariat Dinas.
1. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat membutuhkan SDM yang handal.
  2. Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.
  3. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastuktur pekerjaan umum antar tingkatan pemerintahan dan antar pelaku pembangunan.
  4. Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.

5. Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operator-regulator menjadi dominan regulator-fasilitator.

#### 2.4.2. Peluang

Adapun beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
- b. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/ swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
- c. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kota Bima
- d. Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.
- e. Peningkatan komitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten dan terpadu akan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (sustainable development)
- f. Adanya kerja sama dengan instansi lain untuk memenuhi Permintaan Personil yang bertugas sebagai Pengawas teknis proyek (PTP);
- g. Meningkatnya kesadaran pelaku jasa konstruksi (rekanan) terhadap pentingnya Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi (K3);
- h. Tuntutan masyarakat akan reformasi dalam pelayanan kecepatan dan ketepatan pelayanan mendapatkan informasi (pelayanan prima)

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2017-2018, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama dan tahun kedua, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2008-2013.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

##### **3.1.1. Sekretariat**

- a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
- b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.





- c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima belum optimal.
- d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Peran aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima sebagai perpanjangan tangan Walikota masih perlu ditingkatkan.

#### 3.1.2. Bidang Sumberdaya Air

- a. Terdapat defisit imbangan air irigasi pada beberapa DI di musim kemarau serta bangunan irigasi yang sudah berumur.
- b. Belum terpenuhinya target penambahan Air baku dikarenakan keterbatasan anggaran daerah untuk irigasi.
- c. Kurang optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan;

#### 3.1.3. Bidang Bina Marga

- a. Belum seluruhnya jalan dan jembatan propinsi dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan propinsi.
- b. Pembukaan jalan ekonomi dan atau jalan usaha tani dengan dukungan pemeliharaan jalan dan jembatan Kota Bima sangat dibutuhkan untuk memberikan akses kegiatan ekonomi masyarakat.

#### 3.1.4. Bidang Cipta karya

- a. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak,
- b. Belum optimalnya peran Pemerintah dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar,
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah,
- d. Penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan di Kota Bima masih dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Bima. Hingga saat ini tingkat pelayanan PDAM baru mencapai kurang dari 30 persen, bahkan menunjukkan indikasi makin menurun pencapaiannya yang antara lain disebabkan oleh masih kurang baiknya manajemen pengelolaannya. Hal

ini berdampak pada terjadinya eksploitasi air tanah secara masif oleh masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan air bersih

#### 3.1.5. Bidang Penataan Ruang

- a. Banyaknya peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan
- b. Kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai
- c. Kurangnya kapasitas dan koordinasi kelembagaan di bidang penataan ruang
- d. Belum terintegrasinya indikasi program dalam RTR dengan rencana pembangunan dan program sektoral
- e. ingginya variasi kualitas Rencana Tata Ruang
- f. Masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang dalam rangka monitoring dan evaluasi.

#### 3.1.6. UPTD Work Shop Alat Berat dan Laboraturium

- a. Keterbatasan SDM, peralatan teknis, dan pendukung lainnya dalam pengelolaan Lab Pengujian Material.
- b. Belum optimalnya peran pembinaan jasa konstruksi di daerah, yaitu dengan pasar jasa konstruksi daerah masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara supply dan demand.
- c. Kurangnya pemahaman di masyarakat luas maupun aparat daerah tentang kualitas pembangunan, sehingga perlu peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran Informasi bidang pekerjaan umum

## 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

### 3.2.1. Visi

Visi Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 adalah :

## **"Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Beriman, Maju, Adil, dan Sejahtera".**

Kota Perdagangan dan Jasa memiliki makna sebuah Kota yang bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya.

Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Adapun sebagai Kota Jasa, Kota Bima akan lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang yang menunjang sebagai pusat transaksi dan distribusi.

### 3.2.2. Misi

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka dirumuskan 4 (empat) misi yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

#### **Misi Pertama :**

***"Misi membentuk manusia yang beriman melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal".***

SDM yang berkualitas dan berlandaskan iman merupakan salah satu tolok ukur menuju keberhasilan pembangunan Kota Bima yang "berteman". Landasan moral dan etika manusia yang terbentuk tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukkan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta kesalehan kolektif yang religius untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal.

Nilai religius sosial sebagai perwujudan sifat masyarakat Kota Bima yang bertaqwa merupakan kesatuan utuh dari sikap serta nilai-nilai yang mempengaruhi cara berfikir dan bertindak. Dalam perspektif agama, keimanan dan ketakwaan merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan.

Program prioritas antara lain :

- Program bima berzakat dan maghrib mengaji dalam rangka membumikan al qur'an sehingga terbentuk karakter komunitas yang qur'ani yang ditunjukkan oleh sikap sebagai penyebar salam perdamaian, penyambung silaturahmi, penyantun yang lemah, pengucap yang sejuk, dan pengasah kecerdasan spiritual.
- Dukungan pembangunan rumah ibadah umat beragama, masjid, mushalla dan TPQ sebagai sarana peningkatan dan penguatan nilai-nilai religius masyarakat.
- Peningkatan bantuan kepada lembaga dan kegiatan keagamaan seperti mtq tingkat kelurahan sampai nasional. Penguatan program ini dilakukan melalui kegiatan peningkatan kemampuan ketrampilan dan seni baca al-qur'an dengan mendatangkan qori dan qori'ah internasional. Indikator keberhasilan program ini adalah adanya qori dan qori'ah kita yang mendapat juara ltingkat propinsi dan nasional. Juara nasional akan diberi hadiah 100 juta rupiah.
- Program insentif bagi petugas agama, imam masjid, marbot/bilal, guru ngaji yang memegang peranan penting membentuk ketahanan aqidah ummat.

#### **Misi Kedua :**

***“misi menciptakan manusia yang maju melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat inteletualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual”.***

Dalam rangka mencapai tujuan misi tersebut, diperlukan upaya secara terus menerus untuk menciptakan SDM yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan, yang berlandaskan iman. Masyarakat Kota Bima harus mempunyai kepercayaan diri dan kemandirian untuk berperan maksimal dalam pembangunan di Kota Bima dimasa yang akan datang.

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

Beberapa peningkatan dan akselerasi program diperlukan dalam mengatasi belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan, belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan, belum memadainya

jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan, masih kurang baiknya distribusi tenaga pengajar.

Program prioritas untuk mewujudkan misi ini antara lain:

- program beasiswa bagi siswa berprestasi yang memungkinkan warga miskin dan berprestasi mendapat peluang sampai tingkat pendidikan tinggi.
- program aksi bebas biaya bantuan hukum bagi masyarakat
- program wajib belajar 12 tahun dengan program aksi bebas biaya pendidikan sampai tingkat SMU, SMK, dan sederajat.
- program aksi bebas biaya administrasi kependudukan (KK, KTP, akta kelahiran dan akta nikah)
- pembangunan rumah sakit tipe D untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih bermutu dan terjangkau.
- program aksi bebas biaya kesehatan dasar, persalinan dan uang jaminan perawatan di rumah sakit.
- program aksi bebas biaya ambulance, santunan kematian dan pemakaman.

#### **Misi Ketiga :**

***“misi mewujudkan masyarakat yang adil melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima”.***

Misi mewujudkan pelayanan pemerintahan yang prima merupakan perwujudan dari pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Pelayanan pemerintahan yang prima merupakan syarat penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat, adil dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

Program prioritas untuk mendukung misi ini antara lain:

- pembukaan jalan baru dan perbaikan jalan lingkungan untuk menjamin akses yang merata antar wilayah.



- pemberian insentif bagi petugas Rw dan Rt untuk peningkatan layanan pemerintahan paling bawah.
- pelayanan kebersihan dan drainase kota serta mengembangkan ruang terbuka hijau.
- pengembangan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung layanan publik yang cepat dan berkualitas.
- peningkatan pelayanan air bersih yang menjangkau seluruh masyarakat kota.
- meningkatkan program perlindungan sumberdaya alam hutan, tanah dan air, termasuk kesiap-siagaan bencana untuk memberi perlindungan kepada masyarakat.

**Misi Keempat :**

“misi menjadikan masyarakat sejahtera berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai yang diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional”.

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, mendorong pertumbuhan investasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan misi ini dilakukan melalui program prioritas antara lain:

- peningkatan layanan bisnis dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran
- program bantuan modal dan teknologi bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
- penataan dan pembinaan pedagang kaki lima serta usaha informal lainnya seperti di amahami dan lokasi lainnya untuk mendukung estetika kota.
- penataan kegiatan parkir kota terutama pada kawasan perdagangan dan jasa.
- peningkatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin.
- bantuan stimulan untuk rehabilitasi 2500 rumah tidak layak huni untuk memperkuat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri di perkotaan.



- pembangunan pasar raya pada kawasan utama, dan revitalisasi pasar peninggalan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi.
- pembangunan terminal AKAP Tipe A di kawasan Ni'u sebagai sumbu utama moda transportasi darat.
- melanjutkan pembangunan jalan dua arah menuju pelabuhan, serta pembangunan pelabuhan laut untuk meningkatkan mobilitas arus barang dan jasa pada kawasan strategis cepat tumbuh.

Dari keempat Misi Daerah Kota Bima tersebut di atas, maka misi ke empat adalah misi yang harus di emban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Misi ke empat tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum dan Penataan Ruang, berperan agar infrastruktur di Daerah Kota Bima dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisi yang mantap melalui :

- Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung pariwisata, distribusi lalu-lintas barang dan manusia, ketahanan pangan, serta berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perdesaan;
- Pemenuhan rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dan RPJMD Kota Bima**

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan dua kementerian yaitu : Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra ke dua kementerian tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut :



### 3.3.1. Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014.

#### 3.3.1.1. Kondisi Pekerjaan Umum

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang mempengaruhi kondisi Daerah Kota Bima di antaranya adalah :

- a. Menurunnya fungsi jaringan irigasi, disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi, sehingga menurunnya kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan.
- b. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air.
- c. Target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- d. Dalam penanganan air limbah jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat, namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja.
- e. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan, Sementara itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.
- f. Implementasi kebijakan pembinaan jasa konstruksi selama 8 tahun terakhir, dalam konteks mikro (tata kelola pemerintahan yang baik), konteks meso (usaha dan perusahaan konstruksi), serta konteks makro (kerjasama, persaingan global dan liberalisasi jasa konstruksi) belum mencapai sasaran sebagaimana diamanatkan dalam UU 18/1999. Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan seputar lemahnya penguasaan teknologi, sulitnya akses ke permodalan, serta masih kerap terjadi kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.



### 3.3.1.2. VISI Kementerian Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang:

**“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”.**

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

### 3.3.1.3. MISI Kementerian Pekerjaan Umum

Misi untuk mencapai Visi kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014, yaitu:

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.



7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional

#### 3.3.1.4. Tujuan

Sebagai penjabaran atas visi, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian PU dalam periode 2010-2014 adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim).
2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

#### 3.3.1.5. Sasaran

Sasaran strategis Kementerian PU dalam periode 2010-2017 secara keseluruhan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN.
2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna

mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa.

3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.
5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan.
6. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.

### 3.3.2. Telaahan RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran lima tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang 20



tahun. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, selain menggambarkan visi dan misi, RPJMD juga menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah memuat rumusan arah kebijakan pembangunan atau tahapan pembangunan yang bersifat tahunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Arah kebijakan ini berfungsi akan memudahkan dan membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Daerah Kota Bima menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan selanjutnya disesuaikan dengan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima akan berperan mendukung 2 (dua) misi RPJMD Kota Bima melalui terwujudnya visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2017-2018.



Tabel 1. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah REVIU RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Membentuk manusia yang <b>BERIMAN</b> melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal	Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang religius	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam setiap kehidupan bermasyarakat.	Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama
			Penyediaan secara memadai dan berkesinambungan sarana dan prasarana keagamaan serta mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga keagamaan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana keagamaan Meningkatkan upaya pembinaan lembaga-lembaga keagamaan dan petugas keagamaan
		Terwujudnya peningkatan mental spiritual, toleransi dan kerukunan hidup beragama.	Peningkatan kesadaran, kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat	Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar umat beragama, etnik dan kelompok sosial masyarakat.
	Meningkatkan citra daerah dan menjamin keberlangsungan kearifan lokal	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan beretika.	Peningkatan kecintaan terhadap seni dan budaya daerah	Menggali dan mengembangkan seni, budaya daerah dan kearifan lokal.
Menciptakan manusia yang <b>MAJU</b> melalui	Menciptakan manusia yang	Terwujudnya masyarakat yang	Peningkatan kualitas	Meningkatkan sistem penyelenggaraan pendidikan



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual	memiliki daya saing dan menguasai teknologi.	memiliki daya saing dan menguasai teknologi.	pendidikan	berkualitas	
				Meningkatkan sarana prasarana pendidikan, mutu pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun	
				Meningkatkan minat baca masyarakat	
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dengan kemampuan kreatifitas dan inovasi yang berdaya saing	Meningkatkan kemandirian dan produktifitas generasi muda di berbagai bidang pembangunan	
	Meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.		Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian untuk mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan.
					Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pemerataan petugas kesehatan antar wilayah
				Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Mengendalikan penyebaran penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa
					Melakukan pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan
				Penyelenggaraan	Menyediakan akses layanan



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			jaminan kesehatan masyarakat	kesehatan yang merata dan terjangkau terutama jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
			Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan menuju keluarga siaga dan terciptanya PHBS
Mewujudkan masyarakat yang <b>ADIL</b> melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima.	Mengurangi kesenjangan antar manusia dan antar kawasan/wilayah sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat	Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata antar masyarakat dan wilayah.	Peningkatan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Percepatan penamggulangan kemiskinan melalui Penyediaan kebutuhan dasar dan upaya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
				Meningkatkan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial
				Meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender	Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak	
Mewujudkan pengelolaan pemerintah yang transparan dan akuntabel		Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan prima.	Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan internal SKPD/unit kerja	Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan internal SKPD/unit kerja yang menyangkut administrasi, kinerja, SDM, sarana prasarana dan keuangan
			Perwujudan kepastian hukum dalam	Mengoptimalkan penyelesaian persoalan hukum





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Menyebarkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah
				Mengoptimalkan pengkajian produk hukum daerah dan data hukum
			Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Mengintensifkan pembinaan dalam rangka pengendalian internal
				Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
			Peningkatan tata kelola pendapatan, belanja dan aset daerah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah
				Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah
				Melaksanakan perencanaan penganggaran belanja berbasis kinerja
			Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan	Meningkatkan langkah-langkah koordinasi dalam rangka perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Peningkatan pelayanan umum, komunikasi dan informasi	Memperluas layanan informasi, administrasi kependudukan dan pembangunan
				Mengoptimalkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah
		Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.	Pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima	Menyediakan regulasi bagi pengembangan manajemen kepegawaian dan pengembangan pola karir
				Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel
				Menata SDM aparatur untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah kelurahan
			Peningkatan kapasitas SDM aparatur	Mengefektifkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
Menjadikan masyarakat <b>SEJAHTERA</b> berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan	Mengoptimalkan potensi ekonomi domestik dalam upaya memperkuat struktur ekonomi melalui pengembangan kewirausahaan, penataan kelembangan dan investasi dengan dukungan infrastruktur yang	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat	Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatkan pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro
				Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku UMKM, wirausaha baru melalui fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha, ketrampilan dan informasi usaha
		Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat.	Pengembangan potensi ekonomi daerah	Mengembangkan industri kreatif dengan mengutamakan potensi sumber daya lokal
				Menumbuhkembangkan secara lestari berbagai sumberdaya



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan	memadai			pertanian, pesisir dan laut
				Mengembangkan potensi pariwisata daerah
		Terwujudnya infrastruktur ekonomi yang memadai	Pengembangan potensi pasar	Meningkatkan revitalisasi pasar tradisional
				Meningkatkan fasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang /usaha informal
		Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Peningkatan sistem transportasi perkotaan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan
				Meningkatkan kualitas manajemen parkir, lalu lintas dan angkutan jalan
			Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana ke PU-an
				Meningkatkan akses dan kualitas perumahan yang layak bagi masyarakat
			Peningkatan upaya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang serta pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan layanan publik terhadap kebutuhan pemanfaatan dan pengendalian ruang
				Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan hidup
Peningkatan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Meningkatkan cakupan layanan dan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan, pengendalian dan penanggulangan bencana			



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha	Pengembangan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha	Meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan terpadu yang pro investasi
				Menciptakan ketenteraman dan ketertiban yang kondusif
	Menjamin ketersediaan lapangan kerja dengan meningkatkan kualitas dan kreatifitas tenaga kerja	Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja.	Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kreatifitas, kemandirian, dan kewirausahaan serta optimalisasi perlindungan tenaga kerja	Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran
				Meningkatkan upaya Perlindungan ketenagakerjaan serta harmonisasi hubungan industrial
	Meningkatkan pangsa pasar produksi unggulan lokal	Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi	Penerapan pelayanan publik berstandar internasional bidang investasi	Penyederhanaan prosedur dan birokrasi daerah untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha
				Pengembangan Sistem Pelayanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi
	Meningkatkan ketahanan masyarakat	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat.	Penguatan dan partisipasi berbagai elemen masyarakat dan pemerintah untuk mendukung kamtibmas	Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik sosial untuk menjaga kamtibmas



Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM dan Renstra SKPD/RKPD Kota Bima, diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana pada Tabel 3.2.



Tabel 3.2.  
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bima

<b>Visi : "Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Beriman, Maju, Adil, dan Sejahtera"</b>				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
Misi : 4				
Mewujudkan masyarakat yang <b>ADIL</b> melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintah yang prima.teknologi, di dukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual.				
<b>Program program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>I Lintas Urusan</b>				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Belum sepenuhnya aparat/SDM patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan energi sumberdaya mineral.	Masih rendahnya aparat/SDM yang ingin memahami peraturan perundang-undangan	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mengakses peraturan perundang-undangan yang terkait.



2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Belum optimalnya aset yang dikelola oleh dinas, diperlukan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang	Belum tertatanya dengan baik penataan aset sesuai dengan tupoksi Dinas, dikarenakan SDM yang melokata terbatas	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung penataan aset dengan baik
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi, sebagai bahan dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan, serta diperlukan Sistem informasi yang memadai	Belum tersedianya SDM yang memadai untuk mengelola Monev dengan baik.	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Monev
<b>II. URUSAN WAJIB Pekerja Umum</b>				
6	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Belum seluruhnya jalan dan jembatan Kab./Kota dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan Kab./Kota	Keterbatasan anggaran Daerah (APBD) untuk penanganan peningkatan jalan	Tersedianya SDM dan sarana prasarana yang mampu untuk mengatasi penangangan jalan
7	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			
8	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Belum seluruhnya jalan dan jembatan Kab./Kota yang dipeliharadalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan Kab./Kota	Keterbatasan anggaran Daerah (APBD) untuk penanganan Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, sesuai dengan standar NSPM	Tersedianya SDM dan sarana prasarana yang mampu untuk mengatasi penangangan jalan
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terdapat defisit imbalanced air irigasi pada beberapa DI / Water District di musim kemarau; serta bangunan irigasi yang sudah berumur	Tidak terintegrasinya DI /Water District yang menjadi kewenangan Kab./Kota	Tersedianya jaringan irigasi teknis yang sudah sangat dipahami oleh para petani yang tergabung ke dalam P3A.



		Belum terpenuhinya target penambahan Air baku	Belum terpetanya semua daerah yang perlu penambahan air baku sesuai dengan prioritas	Adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola air baku yang di ambil dari mata air setempat
10	Program Pembangunan Turap, Talud, Bronjong	Kurang optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan;	Belum terkoordinasikan pembagian penanganan bersama Wilayah sungai yang secara kewenangan menjadi kewenangan pusat, tetapi permasalahan banyak melibatkan daerah	Adanya partisipasi masyarakat terutama pada sungai yang meliwati kota untuk ikut mengelola dan mengairi sungai sehingga sungai dapat berdaya guna, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir
11	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak	Adanya kesulitan mencari lokasi sumber air, yang akan dipakai untuk air minum	Adanya saling gotong royong masyarakat untuk mendapatkan air minum yang layak
		Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar	Belum semua penduduk mengelola air limbah yang benar dan ramah lingkungan	Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola air limbah yang benar
12	Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong	Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kota tidak lagi mampu melayani perkembangan kota yang pesat.	Belum berfungsinya sistem drainase sesuai dengan fungsi jaring-an (primer, sekunder, tersier) serta, Kurangnya kesadaran masyarakat dlm ikut pemeliharaan drainase;	Tersedianya forum koordinasi antar SKPD yang dapat membantu untuk mengatasi permasalahan drainase antar wilayah kabupaten/kota





13	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			
14	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			
15	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
16	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan			
17	Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum			
<b>III. URUSAN PILIHAN Energi dan Sumberdaya Mineral</b>				
18	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Belum optimalnya penyediaan listrik perdesaan bagi masyarakat kurang mampu , serta belum terjangkaunya jaringan listrik untuk perdesaan disebabkan keterbatasan anggaran daerah	Tidak semua penduduk mampu untuk menyambung listrik, dikarenakan masalah ekonomi, serta masih belum meratanya jaringan listrik untuk perdesaan	Adanya kemauan masyarakat untuk menyambung listrik.
19	Program Pembinaan , Pengawasan, Pengendalian Pengelolaan , Pendayagunaan Air Tanah	Belum optimalnya pengawasan pengambilan air tanah melalui sumur dalam	Terjadinya penurunan permukaan air tanah setiap tahun, mengakibatkan ketersediaan air tanah yang semakin berkurang	Adanya usaha dari semua pihak untuk mengisi adanya air tanah, antara lain dengan membuat sumur resapan air .
20	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak			



	lingkungan			
21	Pembinaan dan pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan	Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan yang mengubah mineral bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi.	Belum seluruhnya menerapkan industri pengolahan tambang yang ramah lingkungan, serta mengolah hasil tambang sehingga mempunyai nilai tambah	Adanya usaha pengelola usaha pertambangan untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku.
22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan			
<b>IV.</b>	<b>URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian</b>			
23	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			
24	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			
25	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			
26	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat			
<b>V.</b>	<b>URUSAN WAJIB Penataan Ruang</b>			
27	Program Perencanaan Tata Ruang			
28	Program Pemanfaatan Ruang			



### 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :



### 3.4.1. Isu strategis Bidang Sumber Daya Air (SDA)

1. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, dimana dari daerah irigasi yang telah dibangun dan menjadi kewenangan DI Kota Bima, masih banyak daerah irigasi yang belum dapat berfungsi secara optimal karena adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.
2. Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan irigasi.
3. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadiah-wadiah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
4. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.
6. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan bidang SDA, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
7. Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur SDA.
8. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan irigasi.



#### 3.4.2. Isu strategis Bidang Bina Marga

1. Mulai banyaknya titik kemacetan lalu-lintas pada jaringan jalan di perkotaan, yaitu jalan akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pendidikan.
2. Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan jalan di kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penangan jaringan jalan.
4. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).
5. Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRW, yang meliputi pemantapan jaringan jalan Kota Bima.

#### 3.4.3. Isu strategis Bidang ke Cipta Karya

1. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam.
2. Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi
3. Saat ini sekitar 10 % penduduk Kota Bima tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasan Pesisir dan Pegunungan
4. Di satu sisi desentralisasi berhasil membawa pemerintah daerah dalam nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan perkotaan di masing-masing daerah.
5. Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru akan membahayakan daya dukung kota, terutama di wilayah Kec. Rasanae Barat, Mpunda dan Raba.
6. Kerusakan lingkungan hidup
7. Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan.

#### 3.4.4 Bidang Penataan Ruang

1. Belum Efektifnya Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang belum efektif, dan
3. RTRW belum dijadikan acuan pembangunan berbagai sektor



#### 3.4.5. UPTD Work Shop Alat Berat dan Pengujian Material

1. Keterbatasan SDM, peralatan teknis, dan pendukung lainnya dalam pengelolaan Lab Pengujian Material.
2. Belum optimalnya peran pembinaan jasa konstruksi di daerah, yaitu dengan pasar jasa konstruksi daerah masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara supply dan demand.
3. Kurangnya pemahaman di masyarakat luas maupun aparat daerah tentang kualitas pembangunan, sehingga perlu peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran Informasi bidang pekerjaan umum



## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima

##### 4.1.1. Visi

Visi merupakan pernyataan citacita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicitacitakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat. Sehingga perubahan paradigma pembangunan yang muncul adalah lebih banyak menaruh perhatian untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, rasa ketidakterlindungi, rasa terpinggirkan dan dipinggirkan, rasa terkucil dan dikucilkan, mengatasi ketidakadilan lingkungan, baik terhadap sumberdaya alam, tata ruang, maupun permukiman.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi Pembangunan Kota Bima yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2013-2018), yaitu:

***"Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Yang Beriman, Maju, Adil Dan Sejahtera".***

Mengacu pada Visi Kementerian Pekerjaan Umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang yaitu :

***"Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025".***

Dan mengacu pada Visi Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2010 – 2014 yaitu :

***"Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni"***

Bertolak dari pemahaman di atas, serta dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung, sehingga dirumuskan Visi Pembangunan Kota Bima yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2013-2018), Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang Kota Bima, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2017-2018 adalah :

**“Terwujudnya Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan”**

1. Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang yang berkelanjutan, merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang yang penjabarannya meliputi:
  - a. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
  - b. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;
  - c. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai;
  - d. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
  - e. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
  - f. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan
  - g. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.

4.1.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima maka ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017-2018, yaitu :





1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2. Mewujudkan Rencana Penataan Ruang Wilayah sebagai alat kendali pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

## **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima**

Tujuan adalah pernyataan pernyataan tentang hal hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

### **4.2.1. Tujuan**

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima adalah:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur bidang Pekerjaan Umum, dengan indicator :
  - a) Persentase infrastruktur keciptakaryaannya yang berfungsi baik
  - b) Persentase jaringan irigasi teknis yang berfungsi baik
  - c) Persentase jalan dalam kondisi baik
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, dengan indicator:
  - a) Persentase pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW/RDTRK.

### **4.2.2. Sasaran**

Sedang rumusan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima beserta indikator kinerjanya antara lain :

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur keciptakaryaannya dengan indicator:
  - 1) Porsentase Rumah Tangga Bersanitasi.
  - 2) Porsentase Rumah tangga pengguna air bersih.



- 3) Persentase Konektivitas pusat kegiatan dan Pusat Produksi (PK/PP).
- b. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi teknis dengan indikator:
  - 1) Persentase Jaringan Irigasi Teknis.
- c. Meningkatnya kualitas jaringan jalan dengan indikator:
  - 1) Persentase Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik.
  - 2) Persentase penerangan jalan umum yang berfungsi baik.
  - 3) Persentase Meningkatnya Kelancaran saluran drainase.
  - 4) Persentase Panjang Sungai Tertangani.
  - 5) Persentase luas permukiman kumuh Tertangani.
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan tata ruang yang sesuai ketentuan dengan indikator:
  - 1) Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang.
- e. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang dengan indikator:
  - 1) Peningkatan jumlah bangunan ber IMB.



Tabel 4.1  
Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Jangka Mengengah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima  
Tahun 2013 – 2018

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Data Awal Perencanaan (2013)	Target				
								Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat	Meningkatkan kualitas infrastruktur bidang Pekerjaan Umum	Persentase infrastruktur keciptakaryaan yang berfungsi baik	100%	Meningkatnya kualitas infrastruktur keciptakaryaan	Porsentase Rumah Tangga Bersanitasi	71,00%	74,67%	76,50%	80,00%	90,00%	100,00%
						Porsentase Rumah tangga pengguna air bersih	70,00%	75,88%	80,83%	87,00%	95,00%	100,00%
						Porsentase Konektivitas pusat kegiatan dan Pusat Produksi (PK/PP)	84,1%	88,0%	90,0%	94,6%	97,2%	100,0%
			Persentase jaringan irigasi teknis yang berfungsi baik	65%	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi teknis	Porsentase Jaringan Irigasi Teknis	43,00%	47,00%	50,00%	52,00%	60,00%	65,00%
			Persentase jalan dalam kondisi baik	85%	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Porsentase Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik	60,36%	60,93%	65,00%	70,00%	73,42%	85,00%



No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Data Awal Perencanaan (2013)	Target				
								Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Porsentase penerangan jalan umum yang berfungsi baik	0%	0%	0%	80%	100%	100%
						Porsentase Meningkatnya Kelancaran saluran drainase	20,13%	27,00%	35,00%	42,00%	50,89%	59,79%
						Porsentase Panjang Sungai Tertangani	42,00%	44,00%	46,00%	48,00%	50,00%	52,00%
						Porsentase luas permukiman kumuh Tertangani	100,00%	85,02%	81,66%	78,84%	72,88%	68,29%
2.	Mewujudkan Rencana Penataan Ruang Wilayah sebagai alat kendali pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW/RDTRK	6,15%	Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan tata ruang yang sesuai ketentuan	Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang	-	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
					Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB	3,94%	4,46%	4,93%	5,36%	5,76%	6,13%



### 4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2017-2018.

**Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang**, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan tabel 4.2.



Tabel 4.2.  
Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD (2017-2018)

<b>VISI : “Terwujudnya Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan”</b>			
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas infrastruktur bidang Pekerjaan Umum	Meningkatnya kualitas infrastruktur keciptakarya	Peningkatan ketersediaan infrastruktur air limbah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah
		Peningkatan ketersediaan infrastruktur air minum	Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.
		Pengurangan jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase	Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mengurangi titik genangan air
		Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui fasilitas penyediaan prasarana, sarana dasar permukiman, yang memadai dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi teknis	Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi	Melaksanakan pembangunan/rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan meningkatkan kinerja operasi dan pemeliharaan
		Pengendalian daya rusak air untuk menanggulangi dan memulihkan kualitas sungai yang disebabkan	Melaksanakan penanggulangan banjir melalui pengendalian daya rusak air

		oleh daya rusak air	
	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Penyelenggaraan jalan mulai dari wilayah kecamatan menuju aksesibilitas kawasan pusat kegiatan dan pusat produksi	pembukaan jalan baru menuju wilayah pusat produksi dan pusat kegiatan
		Pemeliharaan dan peningkatan jalan dengan kondisdi baik	Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun
		Pemeliharaan dan peningkatan jalan dengan kondisdi baik	Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun
		Pemberian pelayanan jasa pengujian laboratorium kualitas mutu konstruksi yang memenuhi standar	Meningkatkan kualitas pelayanan jasa pengujian laboratorium kualitas mutu konstruksi yang memenuhi standar
Misi 2 : Mewujudkan Rencana Penataan Ruang Wilayah sebagai alat kendali pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan tata ruang yang sesuai ketentuan	Peningkatan Kualitas Produk Perencanaan Ruang	Percepatan Penyelesaian dan Peningkatan Kualitas RTR & Rencana Rinci
		Peningkatan Efektivitas Pemanfaatan Ruang	Sinkronisasi RPJM & Kejelasan Indikator Program
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan Efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penegakan Aturan Zonasi, insentif, sanksi
		Penguatan pengawasan Pelaksanaan Penataan Ruang	Penguatan Mekanisme Audit TR



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD dan Reviu RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan di atas, maka dalam tahun 2013-2018 Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima melaksanakan 25 Program dan 20 Kegiatan yang terbagi dalam 4 Urusan yaitu:

1. Urusan Bersama/Lintas Urusan yang terdiri dari 5 Program dengan 25 kegiatan rutin yang mendukung program/kegiatan urusan pekerjaan umum.
2. Urusan Pekerjaan Umum yang terdiri dari 12 program dengan 31 kegiatan.
3. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yang terdiri dari 4 program dengan 6 kegiatan.
4. Urusan Pertambangan dan Energi yang terdiri dari 4 program dengan 8 kegiatan.

Pada akhir tahun 2016 terjadi perubahan struktur organisasi pemerintah daerah termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Bima menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga membawa dampak perubahan kewenangan OPD. Sehingga Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima tahun 2017-2018 melaksanakan 20 program dan 65 Kegiatan yang terbagi dalam 3 urusan antara lain :

1. Urusan Bersama/Lintas Urusan yang terdiri dari 5 Program dengan 26 kegiatan rutin yang mendukung program/kegiatan urusan pekerjaan umum.
2. Urusan Pekerjaan Umum yang terdiri dari 12 program dengan 31 kegiatan.
3. Urusan Penataan Ruang yang terdiri dari 3 program dengan 9 kegiatan.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 5.1.





Tabel 5.1  
 Reviu Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima  
 Tahun 2013-2018

VISI : "Terwujudnya Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan"

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)					
							Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
<b>LINTAS URUSAN</b>																							
Meningkatkan akuntabilitas OPD	Meningkatnya akuntabilitas OPD	Nilai LKIP OPD	1	03	1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.552,73	100%	1.554,30	100%	1.366,95	100%	2.533,42	100%	1.853,07	100%	8.860,47	Dinas PUPR	OPD
			1	03	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	48 Buah	108 Buah	58,20	172 Buah	84,60	232 Buah	56,98	328 Buah	85,45	424 Buah	121,04	424 Buah	406,27	Dinas PUPR	OPD
			1	03	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	17 Unit	34 Unit	63,85	60 Unit	72,52	86 Unit	21,52	109 Unit	61,22	132 Unit	100,99	132 Unit	320,11	Dinas PUPR	OPD
			1	03	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	132 Org.	298 Org.	90,47	434 Org.	87,51	590 Org.	130,20	746 Org.	130,20	926 Org.	170,57	926 Org.	608,95	Dinas PUPR	OPD
			1	03	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	-	-	-	-	-	-	-	192 Ruang	5,00	384 Ruang	5,00	384 Ruang	10,00	Dinas PUPR	OPD
			1	03	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	48 jenis ATK	120 jenis ATK	159,70	120 jenis ATK	132,95	120 jenis ATK	130,85	120 jenis ATK	93,28	120 jenis ATK	140,97	120 jenis ATK	657,76	Dinas PUPR	OPD
			1	03	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	1.200 Exp.	2.505 Exp.	29,04	3.810 Exp.	29,04	5.115 Exp.	29,04	7.593 Exp.	126,14	10.071 Exp.	107,52	10.071 Exp.	320,77	Dinas PUPR	OPD
			1	03	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang	27 Buah	95 Buah	418,37	150 Buah	198,02	166 Buah	98,10	293 Buah	457,29	322 Buah	438,90	322 Buah	1.610,68	Dinas PUPR	OPD



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)			
							Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					memadai.																
			1 03 1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan	Jumlah kerjasama dengan media	248 Buah	508 Buah	18,90	756 Buah	14,85	1.004 Buah	24,20	1.252 Buah	138,28	1.500 Buah	121,32	1.500 Buah	317,55	Dinas PUPR	OPD	
			1 03 1 7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kegiatan makan minum rapat	-	-	-	4 Bln.	13,50	8 Bln.	13,50	20 Bln.	51,64	32 Bln.	60,36	32 Bln.	139,00	Dinas PUPR	OPD	
			1 03 1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	117 Kali	234 Kali	714,20	358 Kali	921,30	473 Kali	862,56	593 Kali	1.242,12	660 Kali	500,00	660 Kali	4.240,18	Dinas PUPR	OPD	
			1 03 1 9	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	-	-	-	-	-	-	-	20 Kali	142,80	20 Kali	86,40	20 Kali	229,20	Dinas PUPR	OPD	
			1 03 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	431,98	100%	167,65	100%	352,62	100%	430,94	100%	374,99	100%	1.758,18	Dinas PUPR	OPD	
			1 03 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	7 Unit	265,61	-	-	-	-	-	-	-	-	7 Unit	265,61	Dinas PUPR	OPD	
			1 03 2 2	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor Operasional	persentase luas gedung kantor yang direhab/pelihara	44 M2	87 M2	34,00	171 M2	65,00	843 M2	231,20	1.177 M2	190,00	1.511 M2	115,00	1.511 M2	635,20	Dinas PUPR	OPD	
			1 03 2 4	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	2 Unit	23 Unit	132,37	28 Unit	102,65	47 Unit	121,42	70 Unit	209,04	93 Unit	247,44	93 Unit	812,92	Dinas PUPR	OPD	
			1 03 2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	-	-	-	-	-	-	-	24 Buah	31,90	50 Buah	12,55	50 Buah	44,45	Dinas PUPR	OPD	
			1 03 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin	100%	100%	33,00	100%	80,35	100%	17,14	100%	130,80	100%	65,00	100%	326,29	Dinas PUPR	OPD	
			1 03 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pegawai yang memakai seragam dinas lengkap	-	90 Org.	18,00	-	-	194 Org.	17,14	319 Org.	130,80	445 Org.	65,00	445 Org.	230,94	Dinas PUPR	OPD	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)					
							Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			1	03	3	3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pegawai yang memakai pakaian kerja lapangan	-	90 Org.	15,00	-	-	-	-	-	-	90 Org.	15,00	Dinas PUPR	OPD		
			1	03	3	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pegawai yang memakai pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	93 Org.	50,60	-	-	-	-	93 Org.	50,60	Dinas PUPR	OPD		
			1	03	3	6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pegawai yang memakai Pakaian Seragam Olah Raga	-	-	-	93 Org.	29,75	-	-	-	-	93 Org.	29,75	Dinas PUPR	OPD		
			1	03	5		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional	-	100%	49,16	100%	95,83	-	-	-	-	100%	144,99	Dinas PUPR	OPD		
			1	03	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan	-	5 Org.	49,16	10 Org.	95,83	-	-	-	-	10 Org.	144,99	Dinas PUPR	OPD		
			1	03	6		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	158,00	100%	217,50	100%	255,07	100%	218,30	100%	264,30	100%	1.113,17	Dinas PUPR	OPD
			1	03	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	-	-	-	-	-	-	-	4 Lap.	24,65	8 Lap.	64,65	8 Lap.	89,30	Dinas PUPR	OPD
			1	03	6	2	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	5 Lap.	6 Lap.	22,00	7 Lap.	27,50	8 Lap.	73,57	9 Lap.	24,65	10 Lap.	18,65	10 Lap.	166,37	Dinas PUPR	OPD
			1	03	6	3	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	-	-	-	-	-	1 Lap.	15,00	2 Lap.	12,35	3 Lap.	16,35	3 Lap.	43,70	Dinas PUPR	OPD
			1	03	6	4	Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	5 Lap.	6 Lap.	22,00	7 Lap.	27,50	8 Lap.	22,50	9 Lap.	24,65	10 Lap.	34,65	10 Lap.	131,30	Dinas PUPR	OPD
			1	03	6	5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA-SKPD	20 Dok.	24 Dok.	82,00	28 Dok.	120,00	32 Dok.	108,00	36 Dok.	98,50	40 Dok.	96,50	40 Dok.	505,00	Dinas PUPR	OPD



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2014		2015		2016		2017		2018				Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)		
										Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)						
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			1	03	6	6	Penyusunan LAKIP, LPJ, LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	5 Lap.	6 Lap.	32,00	7 Lap.	42,50	8 Lap.	36,00	9 Lap.	33,50	10 Lap.	33,50	10 Lap.	177,50	Dinas PUPR	OPD		
<b>URUSAN WAJIB Pekerjaan Umum</b>																									
Meningkatkan kualitas infrastruktur bidang Pekerjaan Umum	Meningkatnya kualitas infrastruktur keciptakaryaan	Porsentase Rumah Tangga Bersantiansi	1	03	27		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Penduduk terlayani IPAL, SPAM dan SR	70,50%	75,28 %	3.513,40	78,67 %	4.984,52	83,50 %	9.255,75	92,50%	8.729,00	100%	19.666,94	100%	46.149,61	Dinas PUPR	Kota Bima		
			1	03	27	2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah Penduduk yang terlayani IPAL dan SR	25.969 Jiwa	27,97 2 Jiwa	1.674,33	29,35 0 Jiwa	2.481,24	30,70 5 Jiwa	4.500,09	34,558 Jiwa	3.178,36	38,41 4 Jiwa	10.107,90	38,41 4 Jiwa	21.941,92	Dinas PUPR	Kota Bima		
			1	03	27	4	Pembinaan teknik pengolahan air limbah		-	100 Org.	120,00	100 Org.	78,74	100 Org.	44,19	100 Org.	67,69	100 Org.	310,62	Dinas PUPR	Kota Bima				
		Porsentase Rumah tangga pengguna air bersih	1	03	27	1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masy. berpenghasilan rendah	Jumlah Penduduk Terlayani Kebutuhan Air Minum	25.604 Jiwa	28,22 5 Jiwa	1.789,06	31,01 1 Jiwa	2.308,28	33,39 2 Jiwa	4.676,91	36,478 Jiwa	5.506,45	38,41 4 Jiwa	9.491,35	38,41 4 Jiwa	23.772,06	Dinas PUPR	Kota Bima		
			1	03	27	7	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum		200 Jiwa	50,00	976 Jiwa	75,00	-	-	-	-	-	-	976 Buah	125,00	Dinas PUPR	Kota Bima			
		Porsentase Konektivitas pusat kegiatan dan Pusat Produksi (PK/PP)			1	03	15		PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Panjang jaringan Jalan yang dibangun	84,08%	88,00 %	28.640,60	90,00 %	72.456,83	94,56 %	78.237,31	97,20%	7.429,74	100%	22.690,26	100%	209.454,74	Dinas PUPR	Kota Bima
					1	03	15	3	Pembangunan jalan	Panjang Jalan yang dibangun	217,01 Km	227,1 3 Km	28.640,60	232,2 9 Km	72.435,63	254,2 3 Km	68.873,69	261,33 Km	7.429,74	268,8 6 Km	18.691,04	268,8 6 Km	196.070,70	Dinas PUPR	Kota Bima
					1	03	15	5	Pembangunan jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	-	-	-	-	-	1 Buah	9.364	-	-	1 Buah	3.999,22	2 Buah	13.362,84	Dinas PUPR	Kota Bima
					1	03	15	6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (15.06)	Kumulatif	-	-	-	10 Kali	21,20	-	-	-	-	-	-	10	21,20	Dinas PUPR	Kota Bima
		Meningkatnya kualitas jaringan irigasi teknis		Porsentase Jaringan Irigasi Teknis	1	03	24		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN	Panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik	43,00%	47,00 %	2.632,26	50,00 %	3.439,50	52,00 %	5.341,85	60,00%	7.096,62	65,00 %	4.673,10	65,00 %	23.183,32	Dinas PUPR	Kota Bima



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)					
							Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					PENGAIRAN LAINNYA																		
			1 03 24 1 0	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi terpelihara	19.983 M	2.789 M	336,18	6.355 M	940,74	6.760 M	1.494,27	8.174 M	2.080,40	6.949 M	1.075,10	8.174 M	5.926,68	Dinas PUPR	Kota Bima			
			1 03 24 1 7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (24.17)	Kumulatif		-	-	10 Kali	21,20	-	-	-	-	-	-	10 Kali	21,20	Dinas PUPR	Kota Bima			
			1 03 24 1 8	Pembangunan Jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi terbangun		19.052 M	2.296,08	16.880 M	2.477,56	17.405 M	3.847,59	19.709 M	5.016,22	23.257 M	3.598,00	23.257 M	17.235,44	Dinas PUPR	Kota Bima			
	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik	1 03 18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Panjang jaringan jalan yang berfungsi baik	60,36%	60,93 %	5.355,36	65,00 %	8.436,82	70,00 %	14.770,91	58,55%	16.009,86	60,37 %	5.573,80	70,00 %	50.146,74	Dinas PUPR	Kota Bima			
			1 03 18 3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang dipelihara	123,34 Km	124,50 Km	4.711,19	132,82 Km	8.326,60	143,04 Km	13.518,01	151,13 Km	15.910,16	155,81 Km	5.473,60	155,81 Km	47.939,56	Dinas PUPR	Kota Bima			
			1 03 18 4	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara		6 Buah	644,17	7 Buah	110,22	9 Buah	1.252,90	10 Buah	99,70	11 Buah	100,20	11 Buah	2.207,18	Dinas PUPR	Kota Bima			
			1 03 7	PROGRAM PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN	Panjang jaringan jalan yang berfungsi baik	-	-	-	-	-	-	-	14,87%	72.765,69	24,63 %	55.100,48	24,63 %	127.866,17	Dinas PUPR	Kota Bima			
			1 03 7 3	Peningkatan Jalan	Panjang Jalan dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	38,37 Km	72.765,69	63,58 Km	47.214,12	63,58 Km	119.979,81	Dinas PUPR	Kota Bima			
			1 03 7 5	Peningkatan jembatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Buah	7.886,36	1 Buah	7.886,36	Dinas PUPR	Kota Bima			
			1 03 22	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN	dokumen data dasar jalan dan jembatan yang disusun	2 Dok.	-	-	-	-	4 Dok.	89,29	9 Dok.	241,00	14 Dok.	358,45	14 Dok.	688,74	Dinas PUPR	Kota Bima			
			1 03 22 1	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dok.	-	-	-	-	2 Dok.	44,64	7 Dok.	241,00	12 Dok.	358,45	12 Dok.	644,09	Dinas PUPR	Kota Bima			
			1 03 22 2	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan		1 Dok.	-	-	-	-	2 Dok.	44,65	-	-	-	-	2 Dok.	44,65	Dinas PUPR	Kota Bima			
			1 03 23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Alat Berat yang beroperasi dan berfungsi baik	55,56%	77,78 %	247,67	22,22 %	167,35	33,33 %	530,94	66,67%	522,33	88,89 %	820,92	88,89 %	2.289,21	Dinas PUPR	Kota Bima			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)		
							Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				KEBINAMARGAAN																
			1 03 23 1 0	Rehabilitasi/pemeliharaan araan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang berfungsi baik	5 Unit	7 Unit	138,47	2 Unit	44,54	3 Unit	390,30	6 Unit	319,15	8 Unit	481,50	8 Unit	1.373,96	Dinas PUPR	Kota Bima
			1 03 23 1 3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (23.13)	Kumulatif	-	6 Kali	109,20	12 Kali	122,81	18 Kali	140,64	24 Kali	203,18	31 Kali	339,42	31 Kali	915,25	Dinas PUPR	Kota Bima
		Persentase penerangan jalan umum yang berfungsi baik	1 03 31	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENERANGAN JALAN UMUM	penerangan jalan umum yang berfungsi baik	-	-	-	-	-	79,64 %	-	100%	4.617,83	100%	7.550,00	100%	12.167,83	Dinas PUPR	Kota Bima
			1 03 31 1	Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik lampu yang menyala	-	-	-	-	-	1.236 Ttk Lam.	-	1.552 Ttk Lam.	4.617,83	365 Ttk Lam.	7.550,00	1.552 Ttk Lam.	12.167,83	Dinas PUPR	Kota Bima
		Persentase Meningkatkan Kelancaran saluran drainase	1 03 16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	panjang saluran drainase yang berfungsi baik	20,13%	27,00 %	6.733,61	35,00 %	3.736,06	42,00 %	2.451,55	50,89%	4.001,02	59,79 %	4.206,71	59,79 %	21.128,95	Dinas PUPR	Kota Bima
			1 03 16 3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase Terbangun	12.024 M	16.128 M	6.733,61	20.907 M	3.692,06	25.088 M	2.451,55	29.349,86 M	3.121,60	33.270 M	2.663,05	33.270 M	18.661,87	Dinas PUPR	Kota Bima
			1 03 16 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase Terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	1.050 M	879,42	2.442 M	1.543,66	2.442 M	2.423,08	Dinas PUPR	Kota Bima
			1 03 16 6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (16.04)		-	-	-	10 Kali	44,00	-	-	-	-	-	-	10 Kali	44,00	Dinas PUPR	Kota Bima
		Persentase Panjang Sungai Tertangani	1 03 17	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	panjang sungai yang berfungsi baik	42,00%	44,00 %	6.075,14	46,00 %	6.246,33	48,00 %	4.285,96	50,00%	8.942,80	52,00 %	5.814,84	52,00 %	31.365,07	Dinas PUPR	Kota Bima
			1 03 17 3	Pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang turap/talud/bronjong terbangun	43.680 M	45.760 M	6.075,14	47.840 M	6.202,33	49.920 M	4.285,96	52.000 M	8.942,80	54.080 M	5.089,54	54.080 M	30.595,77	Dinas PUPR	Kota Bima
			1 03 17 4	Pemeliharaan		-	-	-	-	-	-	-	-	290 M	725,30	290 M	725,30	Dinas	Kota	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2014		2015		2016		2017		2018				Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)
										Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							turap/talud/bronjong															PUPR	Bima
			1	03	17	6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (17.04)	Kumulatif	-	-	-	10 Kali	44,00	-	-	-	-	-	-	10 Kali	44,00	Dinas PUPR	Kota Bima
		Porsentase luas permukiman kumuh Tertangani	1	03	30		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	9,91%	11,93 %	2.005,34	13,94 %	4.721,09	15,95 %	6.771,19	17,97%	14.275,77	19,98 %	14.474,80	19,98 %	42.248,20	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03	30	1	Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan	Jumlah gambar teknik yang diverifikasi dan direkomendasikan	-	-	-	250 TBG	45,53	500 TBG	32,98	850 TBG	87,30	1.200 TBG	87,30	1.200 TBG	253,10	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03	30	2	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan ditingkatkan	85,39 Km	102,7 3 Km	2.005,34	120,0 7 Km	4.675,57	137,4 1 Km	6.738,22	154,75 Km	14.188,47	172,0 9 Km	14.387,50	172,0 9 Km	41.995,10	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03	29		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Luas Penanganan wilayah kumuh	-	14,98 %	4.079,97	18,34 %	6.137,72	21,16 %	4.403,14	27,12%	27.715,89	31,71 %	13.260,27	31,71 %	55.597,01	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03	29	2	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Luas wilayah strategis yang terbangun	108,98 Ha	90,50 Ha	3.986,88	85 Ha	5.900,14	80,70 Ha	4.151,08	76,42 Ha	26.966,17	71,42 Ha	12.472,90	71,42 Ha	53.477,16	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03	29	4	Biaya Operasional Program (BOP) PNPB dan P2KP	Luas Wilayah PNPB dan P2KP		2,16 Ha	93,10	1,36 Ha	89,95	2,12 Ha	102,28	-	-	-	-	0,00 Ha	285,34	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03	29	5	Pendampingan Program NUSP-Phase 2	Luas wilayah penanganan program NUSP		-	-	2,23 Ha	147,63	3,10 Ha	149,78	1,75 Ha	557,76	1,75 Ha	659,41	1,75 Ha	1.514,59	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03	29	6	Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Luas wilayah penanganan program Tanpa Kumuh (KOTAKU)		-	-	-	-	-	-	1,25 Ha	191,96	1,25 Ha	127,96	1,25 Ha	319,92	Dinas PUPR	Kota Bima
<b>URUSAN WAJIB Penataan Ruang</b>																							
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan tata ruang yang sesuai ketentuan	Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang	1	03	32		PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Jumlah Dokumen Tataruang Kota Bima	-	-	-	-	-	-	-	100%	966,17	100%	932,56	100%	1.898,72	Dinas PUPR	OPD



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)			
							Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1	03	32	2	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan RDTRK, RTRK, dan RTBL	-	-	-	-	-	3 Dok.	391,69	5 Dok.	501,13	5 Dok.	892,82	Dinas PUPR	2008
			1	03	32	7	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Jumlah dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan	-	-	-	-	-	1 Dok.	405,87	-	-	1 Dok.	405,87	Dinas PUPR	170
			1	03	32	1 2	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	Jumlah aparat yang memahami perencanaan tata ruang	-	-	-	-	-	60 Org.	93,52	120 Org.	91,46	120 Org.	184,97	Dinas PUPR	119
			1	03	32	1 3	Survey dan pemetaan	Jumlah Dokumen data dasar dan pemetaan	-	-	-	-	-	1 Dok.	75,09	2 Dok.	339,98	2 Dok.	415,06	Dinas PUPR	170
			1	03	33		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Jumlah Standar Acuan Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	-	-	-	-	-	100%	419,15	100%	661,37	100%	1.080,52	Dinas PUPR	OPD
			1	03	33	7	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Jumlah Sosialisasi dokumen SOP pemanfaatan ruang	-	-	-	-	-	5 Kali	365,96	10 Kali	476,19	10 Kali	842,15	Dinas PUPR	459
			1	03	33	9	Monitoring, evaluasi dan pemanfaatan ruang (33.09)		-	-	-	-	-	1 Dok.	53,19	2 Dok.	185,18	2 Dok.	238,37	Dinas PUPR	459
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB	1	03	34		PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	kelayakan bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB dan SLF	3,94%	4,46%	-	4,93%	-	5,76%	156,70	6,13%	261,94	6,13%	418,64	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03		1	Penerbitan Sertifikasi IMB	Jumlah dokumen pengajuan IMB yang direkomendasikan	1.362 IMB	1.612 IMB	-	1.862 IMB	-	2.362 IMB	58,10	2.612 IMB	261,94	2.612 IMB	320,04	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03		1 2	Penerbitan Sertifikat SLF (Sertifikat Layak Fungsi)	Jumlah SLF yang direkomendasikan	-	-	-	-	-	150 SLF	49,30	-	-	150 SLF	49,30	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03		1 3	Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	Jumlah gambar teknik yang diverifikasi dan direkomendasikan	-	-	-	-	-	250 TABG	49,30	-	-	250 TABG	49,30	Dinas PUPR	Kota Bima





Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2014		2015		2016		2017		2018				Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)
										Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
<b>URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian</b>																							
			1	20	17		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Dokumen Inventarisasi Aset Daerah	-	-	-	1 Dok.	40,51	2 Dok.	34,01	-	-	-	-	2 Dok.	74,52	Dinas PUPR	OPD
			1	20	17	29	Penyusunan Data Inventarisasi Aset Daerah	Jumlah Dokumen Data Inventarisasi Aset Daerah	-	-	-	1 Dok.	40,51	2 Dok.	34,01	-	-	-	-	2 Dok.	74,52	Dinas PUPR	OPD
			1	20	23		PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Tersusunnya Dokumen PPID	-	-	-	1 Dok.	43,54	-	-	-	-	-	-	1 Dok.	43,54	Dinas PUPR	OPD
			1	20	23	1	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah Dokumen PPID	-	-	-	1 Dok.	43,54	-	-	-	-	-	-	1 Dok.	43,54	Dinas PUPR	OPD
			1	20	26		PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Tersedianya Produk Hukum Daerah	-	1 Dok.	40,00	2 Dok.	119,03	-	-	-	-	-	-	2 Dok.	159,03	Dinas PUPR	OPD
			1	20	26	2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah	-	-	-	1 Dok.	119,03	-	-	-	-	-	-	1 Dok.	119,03	Dinas PUPR	OPD
			1	20	26	7	Penyusunan dan penerbitan Produk Hukum Daerah		-	1 Dok.	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok.	40,00	Dinas PUPR	OPD
			1	20	26	17	Penyusunan Peraturan Walikota dan Draf Rancangan Peraturan Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	OPD
			1	20	28		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan Minimum	-	-	-	1 Dok.	49,37	2 Dok.	22,20	-	-	-	-	2 Dok.	71,57	Dinas PUPR	OPD
			1	03	28	8	Penyusunan Standar Pelayanan Minimum	Jumlah Dokumen SPM	-	-	-	1 Dok.	49,37	2 Dok.	22,20	-	-	-	-	2 Dok.	71,57	Dinas PUPR	OPD
<b>URUSAN PILIHAN Energi dan Sumberdaya Mineral</b>																							



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)		
							Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2 03 15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Luas Area Pertambangan Tanpa Ijin Yang di Tertibkan	-	93,54 %	183,13	94,93 %	154,79	98,60 %	91,93	-	-	-	-	99%	429,85	Dinas PUPR	Kota Bima
			2 03 15 4	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan	Jumlah Dokumen produksi pertambangan	-	1 Dok.	108,82	-	-	2 Dok.	43,75	-	-	-	-	2 Dok.	152,57	Dinas PUPR	OPD
			2 03 15 5	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C	Luas Area Pertambangan Tanpa Ijin Yang di Tertibkan	272,35 Ha	17,60 Ha	74,31	13,80 Ha	70,79	3,80 Ha	48,18	-	-	-	-	18 Ha	193,28	Dinas PUPR	Kota Bima
			2 03 15 7	Pemetaan Daerah Rawan Gerakan Tanah	Jumlah Dokumen Daerah Rawan Gerakan Tanah	-	-	-	1 Dok.	84,00	-	-	-	-	-	-	1 Dok.	84,00	Dinas PUPR	OPD
			2 03 16	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN	Rerata penurunan muka air tanah	13,00%	16,00 %	518,38	18,00 %	195,08	-	-	-	-	-	-	18%	713,45	Dinas PUPR	Kota Bima
			2 03 16 1	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	Jumlah Sosialisasi Pengolahan Pertambangan	-	-	-	2 Kali	195,08	-	-	-	-	-	-	2 Kali	195,08	Dinas PUPR	Kota Bima
			2 03 16 4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perindungan dan Konservasi SDA	Jumlah Alat Pelatihan Pengolahan Bahan Galian	-	18 Buah	518,38	-	-	-	-	-	-	-	-	18 Buah	518,38	Dinas PUPR	OPD
			2 03 17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIK AN	Pencapaian rasio elektrifikasi	69,00%	-	-	73,00 %	61,17	-	-	-	-	-	-	73,00 %	61,17	Dinas PUPR	Kota Bima
			2 03 17 1	Koordinasi pengembangan ketenaga listrik	Pencapaian rasio elektrifikasi	-	-	-	73,00 %	61,17	-	-	-	-	-	-	73,00 %	61,17	Dinas PUPR	Kota Bima
			2 03 18	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN	Pengawasan Penggunaan Air Tanah Dalam	-	100%	78,86	100%	147,49	100%	127,73	-	-	-	-	100%	354,08	Dinas PUPR	Kota Bima



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)			
							Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				ENERGI																	
			1 03 18 1	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Dalam	Jumlah Pengujian Sampel Air Tanah Dalam	-	2 Kali	78,86	4 Kali	73,84	6 Kali	81,48	-	-	-	-	6 Kali	234,18	Dinas PUPR	OPD	
			1 03 18 2	Pemetaan Ketinggian Muka Air Tanah	Jumlah Dokumen Pemetaan air tanah	-	-	-	1 Dok.	73,65	2 Dok.	46,25	-	-	-	-	2 Dok.	119,90	Dinas PUPR	OPD	
<b>Jumlah</b>																					
									62.328,59		113.252,83		128.405,54		177.203,02		158.603,80		639.793,77		



## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum dan Penataan Ruang.

Prestasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima tahun 2013 - 2018.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja periode sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2013 – 2018 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (Outcome)	PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Pekerjaan Umum</b>		
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur keciptakarya	Penduduk terlayani IPAL, SPAM dan SR	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi (Rumah Tanga)}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga (Rumah Tanga)}} \times 100$
			$\frac{\text{Jumlah rumah tangga Pengguna Air Minum (Rumah Tanga)}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga (Rumah Tanga)}} \times 100$
		Panjang jaringan Jalan yang dibangun	$\frac{\text{Rencana Penambahan Ruas Jalan Baru Penghubung PK}}{\text{Total Rencana Panjang Jalan yang Menghubungkan Seluruh PK (Km) Akhir RENSTRA}} \times 100$
2.	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi teknis	Panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik	$\frac{\text{Panjang Saluran Irigasi Teknik (m)}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi}} \times 100$
3.	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Panjang jaringan jalan yang berfungsi baik	$\frac{\text{Panjang Jalan dalam kondisi baik (Km)}}{\text{Panjang Jalan Seluruhnya (Km)}} \times 100$
		dokumen data dasar jalan dan	Kumulatif

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (Outcome)	PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
		jembatan yang disusun	
		Alat Berat yang beroperasi dan berfungsi baik	$\frac{\text{Jumlah alat- alat berat dan lab kondisi baik}}{\text{Jumlah Alat Berat dan Lab}} \times 100$
		penerangan jalan umum yang berfungsi baik	$\frac{\text{Titik lampu menyala}}{\text{Jumlah Titik Lampu}} \times 100$
		panjang saluran drainase yang berfungsi baik	$\frac{\text{Panjang saluran drainase terbangun}}{\text{Total panjang saluran drainase}} \times 100$
		panjang sungai yang berfungsi baik	$\frac{\text{Panjang Turap/Talud/Bronjong terbangun (M)}}{\text{Total panjang Sungai (M)}} \times 100$
		Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	$\frac{\text{panjang jalan lingkungan tertangani}}{\text{panjang jalan lingkungan}} \times 100$
		Porsentase Luas Permukiman Kumuh	$\frac{\text{Luas permukiman kumuh}}{\text{Luas seluruh area permukiman}} \times 100$
	<b>Penataan Ruang</b>		
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan tata ruang yang sesuai ketentuan	Jumlah Standar Acuan Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Kumulatif
		Jumlah Dokumen Tataruang Kota Bima	Kumulatif

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (Outcome)	PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	kelayakan bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB dan SLF	$\frac{\text{Jumlah Bangunan Ber IMB}}{\text{Jumlah Bangunan}} \times 100$





## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima 2017-2018 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima guna mencapai sasaran-sasaran Dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan Penataan Ruang dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2013-2018 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan, perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Kota Bima dapat sejahtera menyongsong peradaban baru.